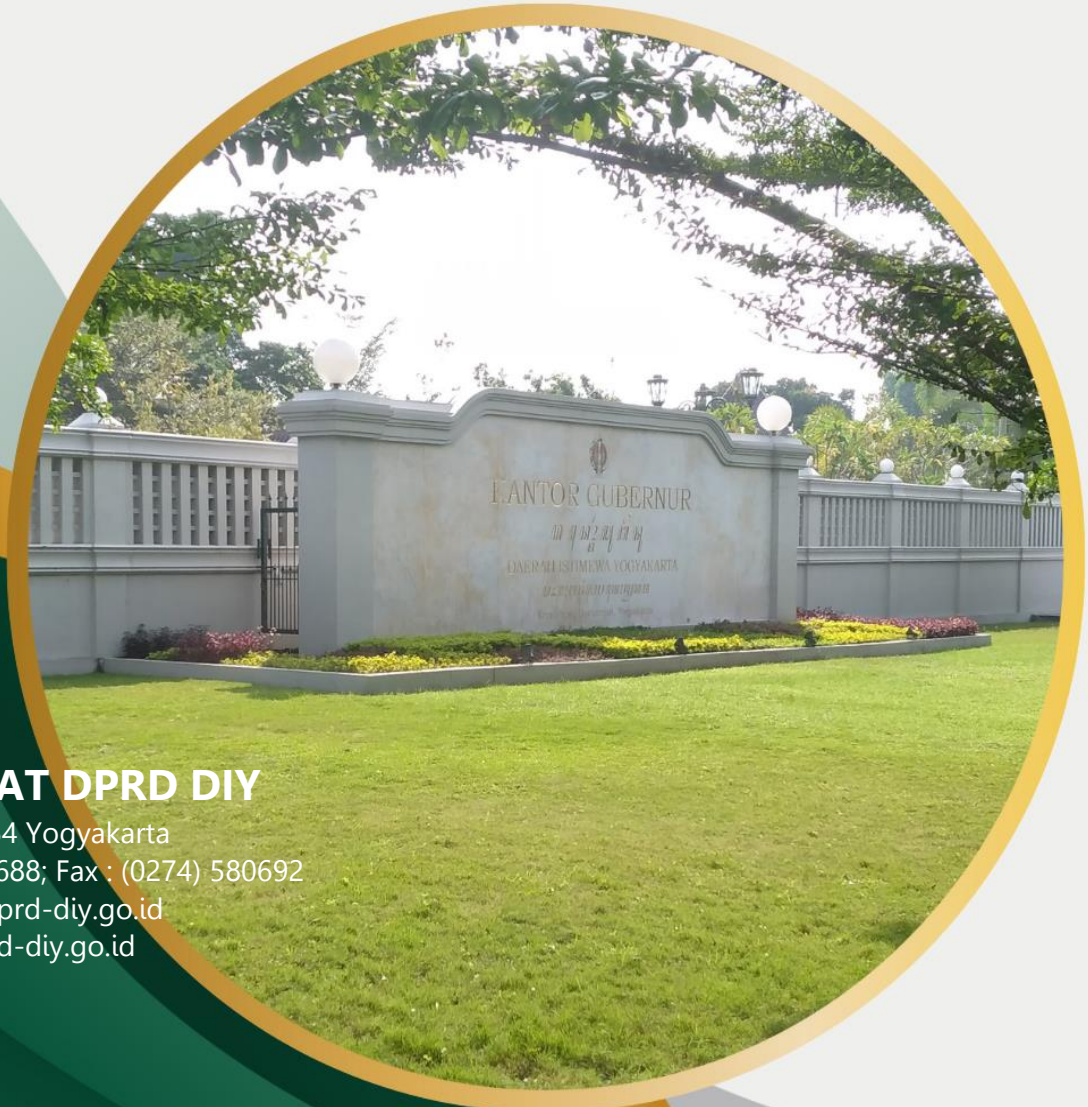
2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SEKRETARIAT DPRD DIY
Jalan Malioboro 54 Yogyakarta
Telp. : (0274) 512688; Fax : (0274) 580692
Surel : setwan@dprd-diy.go.id
Laman : www.dprd-diy.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 13 Februari 2025

Sekretaris DPRD DIY,



Yudi Ismono, S.Sos., M. Acc

Capaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal” :
   - Diukur dengan indikator Kepuasan pelayanan kepada DPRD (Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD)
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Terfasilitasinya Kinerja DPRD dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Sekretariat DPRD DIY.
   - Target capaian indikator tahun 2024 sebesar 83,00%; sampai dengan bulan Desember terealisasi 92,81%. Dengan demikian capaian ini melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 111,82%
   - Dibandingkan capaian indikator tujuan tahun 2023 sebesar 90,36% terjadi kenaikan sebesar 21,46%.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Terfasilitasinya Kinerja DPRD”:
   - Diukur dengan indikator persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu.
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 96,00%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 116,66%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 121,52%.
   - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 137,09% terjadi penurunan sebesar 20,43%.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Sekretariat DPRD DIY”:
   - Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY.
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

- Target capaian indikator sasaran Tahun 2024 sebesar 82%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 88,76%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 108,24%.
- Dibandingkan capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 99% terjadi kenaikan sebesar 9,24%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti perubahan tersebut;
2. kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Lokasi kantor DPRD yang terletak di kawasan Malioboro dijadikan kawasan pedestrian menjadikan akses menuju kantor terhambat bahkan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali dan disisi lain kebutuhan ruang rapat untuk DPRD saat ini tidak mencukupi sehingga DPRD DIY membutuhkan gedung baru untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
4. Adanya Pelantikan Anggota DPRD DIY masa jabatan 2024 – 2029 dan terdapat beberapa anggota DPRD yang baru sehingga menuntut adanya penyesuaian dalam memfasilitasi setiap kegiatan.

Daftar Isi

Kata Pengantar **2**
Daftar Isi **5**
Daftar Tabel **6**
Daftar Gambar **7**
BAB I Pendahuluan **8**
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi **8**
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan **11**
1.3 Isu-Isu Strategis **13**
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran **14**
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .. **17**
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja **18**
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD **19**
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan **20**
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 ..... **22**
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..... **27**
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja **30**
BAB III Akuntabilitas Kinerja **32**
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024 ..... **32**
3.2. Capaian Kinerja Lainnya **55**
3.3. Analisis Efisiensi Anggaran **58**
3.4. Inovasi **61**
BAB IV Penutup **67**
L A M P I R A N **70**

Daftar Tabel

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi 14
Tabel I.2. Sarana dan Prasana 15
Tabel I.3. Anggaran Tahun 2024 16
Tabel I.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 17
Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY 2022 - 2027 ..... .19
Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan ..... .20
Tabel II.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 ..... .22
Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tujuan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024 ..... .27
Tabel II.5. Perjanjian Kinerja Sasaran Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024 ..... .28
Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024 ..... .29
Tabel II.7. Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024 ..... .29
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja ..... .32
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024 ..... .32
Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan ..... .34
Tabel III.4. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan ..... .35
Tabel III.5. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 35
Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 36
Tabel III.7. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 37
Tabel III.8. Hasil Penilaian Kinerja Setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 1 42
Tabel III.9. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 45
Tabel III.10. Target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 46
Tabel III.11. Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 47
Tabel III.12. Hasil Penilaian kinerja setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2 53
Tabel III.13. Kontribusi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah 55
Tabel III.14. Kontribusi Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah 57
Tabel III.15. Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024 59
Tabel III.16. Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY 63

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja 9
Gambar I.2. Struktur Organisasi 10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat DPRD DIY 11
Gambar II.1. Monitoring 30
Gambar II.2. JDIH DPRD DIY 30
Gambar II.3. Aplikasi E-Pokir DPRD DIY 31
Gambar III.1.1. Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD DIY Masa Jabatan 2024-2029 44
Gambar III.1.2. Rapat Pansus Pembahasan Tata Tertib DPRD DIY 45
Gambar III.1.3. Pelayanan Medical Check Up Anggota DPRD DIY 55

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:
1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

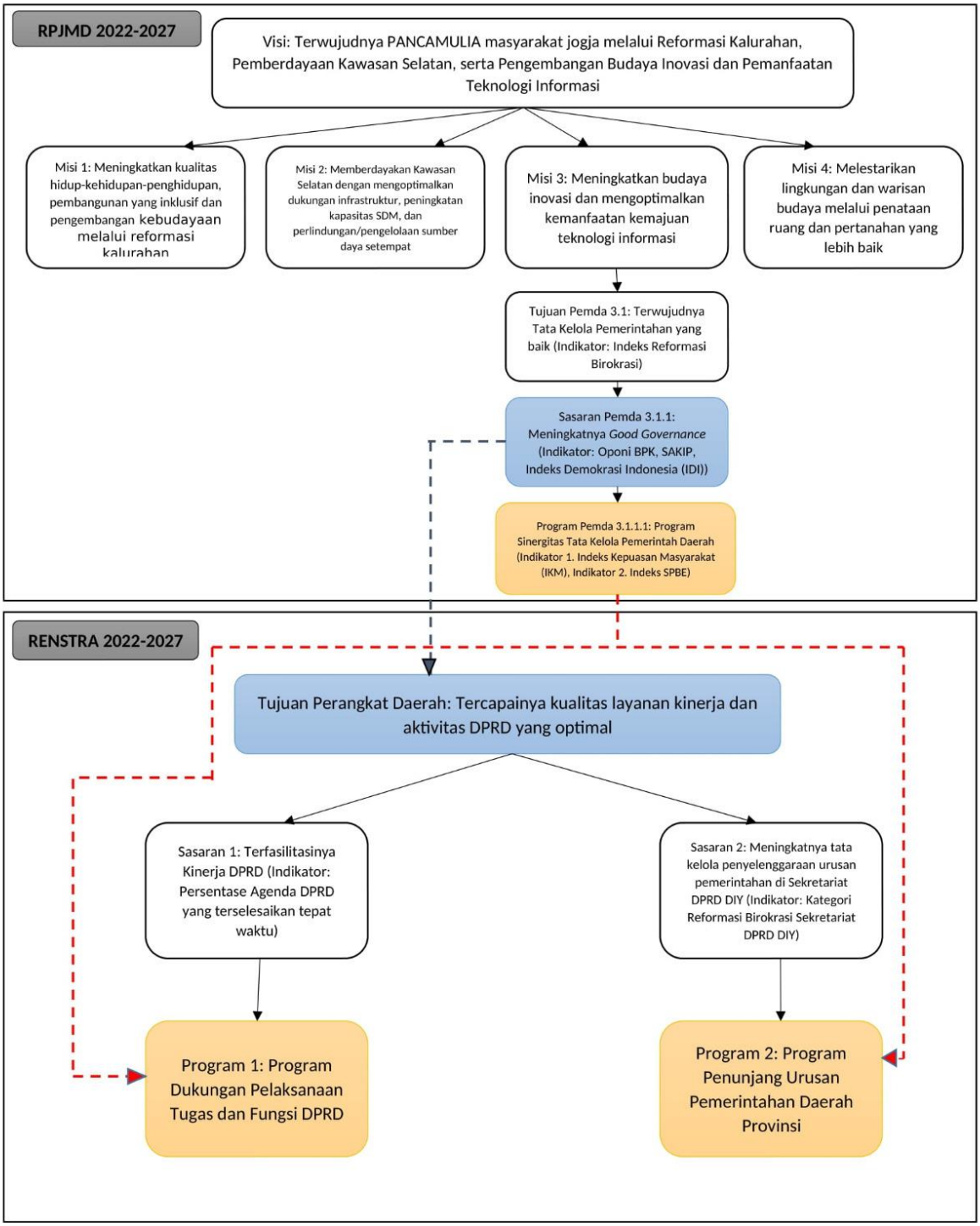
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading* Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Sekretariat DPRD DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.I. *Cascading* Kinerja

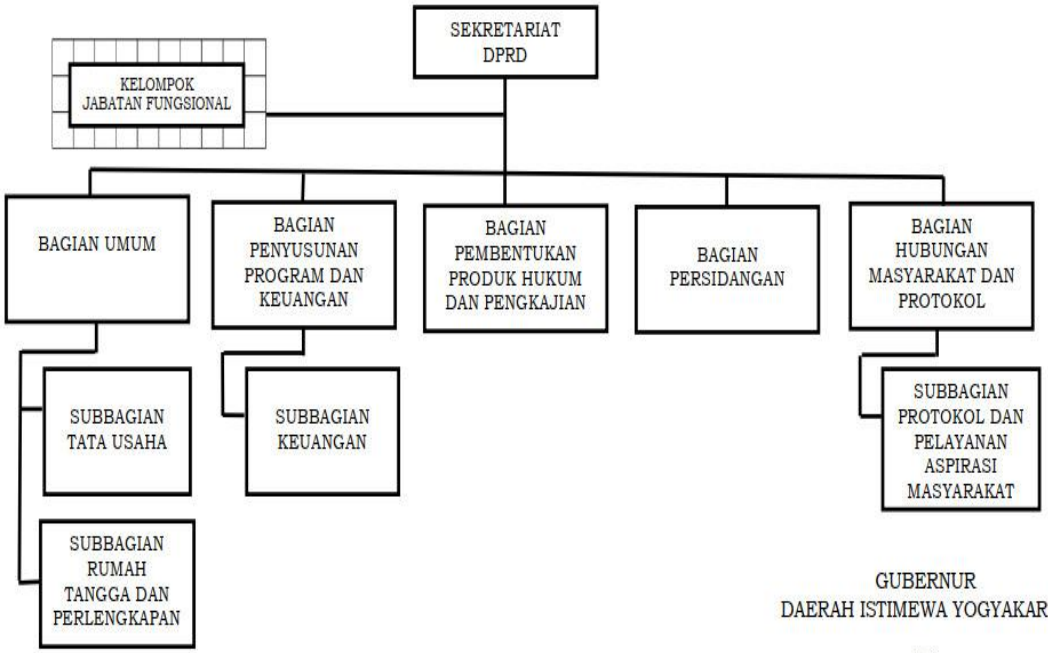


Sumber:RPJMD DIY Tahun 2022-2027

Gambar I.II. Struktur Organisasi

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik HAMENGKU BUWONO X

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD Tahun 2022-2027, Sekretariat DPRD DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.III. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Organisasi Sekretariat DPRD DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD DIY disebutkan bahwa: “Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggungjawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Adapun fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
4. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
6. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
7. Penyusunan program kerja;
8. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
9. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
10. Penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
11. Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
12. Fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
13. Fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
14. Fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
15. Penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar waktu Anggota DPRD;
16. Fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
17. Pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
18. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
19. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Sekretariat DPRD;
20. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD;
21. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/ Fungsional	Jabatan Pelaksana
1) Sekretaris DPRD; 2) Bagian , Subbagian terdiri dari: a. Bagian Umum, terdiri dari 2 Subbagian yaitu : i. Subbagian Tata Usaha ii. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan b. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan terdiri dari 1 Subbagian yaitu: i. Subbagian Keuangan c. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian; d. Bagian Persidangan; e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 1 Subbagian yaitu: i. Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat 3) Kelompok Jabatan Fungsional a. Analis SDM Aparatur. b. Perencana c. Perisalah Legislasi d. Pranata Komputer e. Pranata Kehumasan	1.Dibawah Kabag Umum a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2.Dibawah Kasubbag Tata Usaha a) Pranata Kearsipan b) Pengadministrasi Persuratan c) Ananlis Pelayanan 3.Dibawah Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan a) Tehnisi Sarana dan Prasarana b) Pranata jamuan c) Kustodian Barang Milik Negara d) Pranata Kendaraan e) Pengemudi 4.Dibawah Kabag Penyusunan Program dan Keuangan a) Pengadministrasi Umum b) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan c) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 5.Dibawah Kasubbag Keuangan a) Bendahara b) Pengadministrasi Keuangan c) Pengelola Gaji d) Pengelola Akuntansi e) Verifikator Data dan Laporan Keuangan 6.Dibawah Kabag Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian a) Pengadministrasi Umum b) Analis Legislasi c) Penelaah Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum d) Analis Produk Hukum 7. Dibawah kabag Persidangan a) Pengadministrasi Umum b) Notulis Rapat c) Penyusun Bahan Anggota Dewan d) Penyusun Risalah 8.Dibawah Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol a) Pengadministrasi Umum b) Analis Sistem Informasi c) Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi d) Pengelola Dokumentasi 9.Dibawah Kasubbag Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat a) Analis Protokol

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi DPRD DIY oleh Sekretariat DPRD DIY didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, meliputi:

a. Masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD DIY melalui peningkatan pelayanan kepada DPRD DIY agar dapat menjaring aspirasi positif sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama di pedesaan.
b. Adanya penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat DPRD DIY untuk tetap konsisten dan maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada DPRD DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menyebabkan SDM di Sekretariat DPRD DIY harus mampu beradaptasi dan menambah wawasan terkait kemajuan teknologi dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD DIY.
d. Keterbatasan kawasan perkantoran DPRD Jl. Malioboro Nomor 54 Yogyakarta dimana gedung DPRD DIY merupakan heritage dan rencana penerapan Pedestrian Malioboro menyebabkan terbatasnya akses dan mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga kinerja menjadi kurang optimal sehingga membutuhkan Gedung baru di lokasi yang baru yang lebih representatif.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1	-	-	-			1	-
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	5	5				5	4	1					3	2
	2. Pengawas	4		4			4	2	2					3	1
	3. Pelaksana	82		36	37	9	30	2	15	6	6		1	18	12
C.	Jabatan Fungsional	33		33			13	5	2	6				2	11
	Jumlah	125	6	73	37	9	53	14	20	12	6		1	27	26

Sumber: Data Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (37,74%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14 orang (26,42%), SMA sebanyak 6 orang (11,32%), D3 sebanyak 12 orang (22,64%), dan SD 1 orang (1,88%).

Berdasarkan data tersebut diatas terdapat kekurangan pegawai di Sekretariat DPRD DIY sebanyak 72 orang, yang seharusnya jumlah ASN sebanyak 125 orang hanya terdapat 53 ASN. Untuk jabatan Analis Monitoring dan Evaluasi kosong. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Monitoring dan Evaluasi. Sekretariat DPRD DIY juga terdapat PPPK DIY sebanyak 15 orang dan beberapa tenaga outsourching antara lain Pramuladi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Operator e-library, Staf Fraksi, Operator Penyusun Berita, dan Ajudan Pimpinan DPRD.

Tabel I.2. Sarana dan Prasana

Kode	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
01.03	**Aset Tetap**		
01.03.02	Peralatan dan Mesin	2811	25.627.003.327,09
01.03.03	Gedung dan Bangunan	11	576.741.303.378,00
01.03.04	Jalan, Jaringan dan Irigasi	8	736.629.559,00
01.03.05	Aset Tetap Lainnya	1619	855.691.352,01
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	2.208.063.922,00
01.05	**Aset Lainnya**		
01.05.03	Aset Tidak Berwujud	15	917.246.745,00
01.05.04	Aset Lain-Lain	122	1.290.074.502,00
JUMLAH		4587	608.376.012.785,10

Sumber data: Buku Inventaris Sekretariat DPRD DIY TA 2024

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di Tahun 2024

Kendaraan dinas yang dimiliki Sekretariat DPRD DIY terdiri dari lima unit kendaraan dinas jabatan, yang mencakup satu unit kendaraan untuk operasional Ketua DPRD DIY, tiga unit kendaraan untuk operasional Wakil Ketua DPRD DIY, dan satu unit kendaraan untuk operasional Sekretaris DPRD DIY. Selain itu, terdapat 16 unit kendaraan dinas operasional roda empat, yang terdiri dari empat unit kendaraan jenis *Microbus* tipe Hiace, yang masing-masing digunakan untuk mendukung operasional komisi-komisi, serta sepuluh unit kendaraan roda dua. Di samping itu, terdapat satu unit kendaraan merek Toyota Fortuner yang digunakan untuk operasional tamu pimpinan, dengan status pinjam pakai dari Badan Penghubung Daerah DIY. Pada akhir tahun 2024, pimpinan DPRD DIY periode 2019–2024 mengajukan permohonan untuk pembelian kendaraan dinas perseorangan bagi Bapak Nuryadi, S.Pd., Bapak Huda Tri Yudiana, ST., dan Bapak Anton Prabu Semendawai, SH., M.Kn.

Terkait dengan ruang kantor, secara umum terdapat beberapa ruangan yang mencakup ruang rapat paripurna, ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan (Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan), ruang pimpinan dewan, ruang komisi-komisi, ruang fraksi, serta berbagai ruang bagian, yang meliputi ruang bagian perencanaan dan pengelola keuangan, ruang bagian umum, ruang bagian protokol dan hubungan masyarakat, ruang bagian persidangan, ruang bagian pembentukan produk hukum, ruang arsip, ruang mushola, ruang perpustakaan, dan ruang laktasi. Namun demikian, ruang komisi-komisi saat ini masih belum memadai karena kapasitas ruang yang ada belum

mencukupi untuk menampung seluruh mitra kerja komisi dalam rapat. Oleh karena itu, diperlukan pencarian ruang yang lebih besar.

Selain itu, hingga saat ini, anggota DPRD DIY belum memiliki ruang kerja pribadi, sehingga mereka menggunakan ruang fraksi atau komisi yang tersedia di kantor. Mengenai perlengkapan kantor, seperti meja, kursi, mesin ketik, mesin hitung, mesin fotokopi, brankas, papan tulis, lemari es, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, dan peralatan lainnya, semuanya sudah tersedia dalam kondisi yang baik. Rasio peralatan komputer atau laptop terhadap jumlah pegawai yang hampir mencapai 1:1 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk mendukung kegiatan operasional.

Tabel I.3. Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening			Uraian	Anggaran		Bertambah/ berkurang
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan(Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH			
			Jumlah Pendapatan	-	-	-
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	128.640.885.119	132.463.640.765	3.822.755.646
5	1	01	Belanja Pegawai	55.564.742.020	53.552.049.466	(2.012.692.554)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.076.143.099	78.911.591.299	5.835.448.200
5	2		BELANJA MODAL	46.758.188.000	46.344.469.800	(413.718.200)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	735.388.000	321.669.800	(413.718.200)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.800.000	22.800.000	0
			Jumlah Belanja	175.399.073.119	178.808.110.565	3.409.037.446
			Total Surplus/(Defisit)	(175.399.073.119)	(178.808.110.565)	(3.409.037.446)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
			Pembiayaan Neto	-	-	-

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 Anggaran Sekretariat DPRD DIY semula Rp175.399.073.119,- dan mengalami perubahan menjadi Rp178.808.110.565,- atau bertambah Rp3.409.037.446,-.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel I.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan LKjIP	Bersedia meningkatkan LKjIP
2.	Meningkatkan Kinerja sehingga seluruh target baik *output, outcome* maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya, diantaranya pada subkegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Bersedia meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik *output, outcome* maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up DPRD*, Sekretariat DPRD DIY akan lebih intensif melakukan kegiatan sosialisasi pentingnya cek kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DIY.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2024*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 -2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan melalui mekanisme perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah *"Meningkatnya Good Governance".*

Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD DIY selama lima tahun adalah:

"Tercapainya Kualitas Layanan Kinerja dan Aktivitas DPRD yang Optimal"

Adapun sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, 2022-2027

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (Baseline 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	80	82	83	84	85	86	86
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,5	95,5	96	96	96,5	96,5	97
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	A	A	A	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran melalui badan anggaran DPRD 3. Mengoptimalkan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui komisi-komisi 4. Mengoptimalkan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD 5. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 6. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD 7. Mengoptimalkan fasilitasi tugas-tugas DPRD seperti kunjungan kerja dan keprotokolan 8. Tata Cara Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD DIY 2. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Keuangan Sekretariat DPRD DIY 3. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD DIY 4. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Kepegawaian di Sekretariat DPRD DIY 5. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Umum Sekretariat DPRD DIY 6. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY 7. Meningkatkan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD DIY 8. Meningkatkan fasilitasi terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY 9. Meningkatkan fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 10. Meningkatkan fasilitasi layanan administrasi DPRD 11. Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD DIY tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	**1. Terfasilitasinya kinerja DPRD**	**1.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**0**	**952.407.200**	**952.407.200**
		1.1.1 Perencanaan Dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Tata Cara	**0**	**952.407.200**	**952.407.200**
		1.1.1.1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	0	952.407.200	952.407.200
		1.2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**60.568.882.800**	**65.100.248.600**	**4.531.365.800**
		1.2.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**10.526.888.200**	**12.157.509.600**	**1.630.621.400**
		1.2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.684.493.700	1.500.592.700	(183.901.000)
		1.2.1.2. Pembahasan Rancangan Perda	3.970.802.600	6.130.062.000	1.159.259.400
		1.2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	633.285.900	933.285.900	300.000.000
		1.2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	3.223.569.000	3.162.741.000	(60.828.000)
		1.2.1.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD	14.737.000	430.828.000	416.091.000
		1.2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	**2.359.623.000**	**1.998.573.000**	**(361.050.000)**
		1.2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS	490.223.000	446.775.000	(43.448.000)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	98.651.000	98.651.0000	-
		1.2.2.3. Pembahasan APBD	548.625.000	498.759.000	(49.866.000)
		1.2.2.4. Pembahasan Perubahan APBD	496.093.000	450.392.000	(45.701.000)
		1.2.2.5. Pembahasan Laporan Semester	37.465.500	21.145.500	(16.320.000)
		1.2.2.6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	688.565.500	482.850.500	(205.715.000)
		1.2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**4.932.926.400**	**3.815.095.400**	**(1.117.831.000)**
		1.2.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.739.205.600	1.320.392.600	(418.813.000)
		1.2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.064.573.600	810.079.600	(254.494.000)
		1.2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.064.573.600	783.736.600	(280.837.000)
		1.2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.064.573.600	900.886.600	(163.687.000)
		1.2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD	**14.341.503.100**	**15.004.048.600**	**662.545.500**
		1.2.4.1. Orientasi DPRD	1.172.461.000	1.111.411.000	(61.050.000)
		1.2.4.2. Pendalaman Tugas DPRD	2.714.292.000	4.089.047.000	1.374.755.000
		1.2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.720.983.000	3.564.822.000	156.161.000
		1.2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.422.783.500	1.170.783.500	(252.000.000)
		1.2.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	765.494.500	669.223.500	(96.271.000)
		1.2.4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.545.489.100	4.398.761.600	(146.727.500)
		1.2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**2.713.920.000**	**4.680.165.000**	**1.966.245.000**
		1.2.5.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	281.768.000	227.697.000	(54.071.000)
		1.2.5.2. Pelaksanaan Reses	2.432.152.000	4.452.468.000	2.020.316.000

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**422.576.000**	**845.397.500**	**422.821.500**
		1.2.6.1. Penyusunan Kode Etik DPRD	12.907.000	482.849.500	469.942.500
		1.2.6.2. Pengawasan Kode Etik DPRD	422.576.000	362.548.000	(47.121.000)
		1.2.7. Fasilitasi Tugas DPRD	**25.271.446.100**	**26.599.459.500**	**1.328.013.400**
		1.2.7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.248.081.500	15.012.970.900	764.889.400
		1.2.7.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	35.369.000	35.369.000	-
		1.2.7.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.868.013.000	1.518.862.000	(349.151.000)
		1.2.7.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9.119.982.600	10.032.257.600	912.275.000
	2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	**2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**114.830.190.319**	**111.798.519.765**	**(3.031.670.554)**
		2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**130.171.300**	**96.528.500**	**(Rp33.642.800)**
		2.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.263.800	46.245.000	(13.018.800)
		2.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.882.500	24.432.500	(8.450.000)
		2.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.025.000	25.851.000	(12.174.000)
		2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.675.267.511**	**9.546.374.957**	**(1.128.892.554)**
		2.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.526.300.511	9.399.807.957	(1.126.492.554)
		2.1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.695.000	58.920.000	-
		2.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.731.000	12.900.000	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74.541.000	72.141.000	(2.400.000)
		2.1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**14.905.000**	**14.905.000**	-
		2.1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.905.000	14.905.000	-
		2.1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**299.882.000**	**242.688.000**	**(57.194.000)**
		2.1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	26.258.000	24.938.000	(1.320.000)
		2.1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	273.624.000	217.750.000	(55.874.000)
		2.1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.567.398.000**	**1.450.417.000**	**(116.981.000)**
		2.1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.688.000	40.688.000	-
		2.1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.407.000	264.407.000	-
		2.1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.796.000	200.796.000	-
		2.1.5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.600.000	106.208.000	(14.392.000)
		2.1.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	940.907.000	838.318.000	(102.589.000)
		2.1.6.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**46.735.388.000**	**46.321.669.800**	**(413.718.200)**
		2.1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	727.388.000	1.838.877.900	(413.718.200)
		2.1.6.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.000.000.000	46.000.000.000	-

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.1.6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	8.000.000	-
		2.1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.539.931.500**	**3.156.479.500**	**(132.660.000)**
		2.1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.182.563.500	1.182.563.500	-
		2.1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.357.368.000	2.357.368.000	-
		2.1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.742.968.000**	**1.726.524.000**	**(16.444.000)**
		2.1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	435.305.400	435.305.400	-
		2.1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	714.113.600	697.669.600	(16.444.000)
		2.1.8.3. Pemeliharaan Mebel	8.400.000	8.400.000	-
		2.1.8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.405.000	292.405.000	-
		2.1.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.744.000	292.744.000	-
		2.1.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**46.244.438.009**	**45.005.863.009**	**(1.238.575.000)**
		2.1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	44.967.041.509	44.080.841.509	(886.200.000)
		2.1.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	625.739.500	83.751.100	(900.000)

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		2.1.9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	299.282.000	259.798.300	(15.643.600)
		2.1.10. Layanan Adminstrasi DPRD	**3.879.840.999**	**3.853.617.999**	**(26.223.000)**
		2.1.10.1. Fasilitasi Fraksi DPRD	3.105.495.999	3.105.495.999	-
		2.1.10.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	774.345.000	748.122.000	(26.223.000)
	Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		**175.399.073.119**	**177.851.175.565**	**2.452.102.446**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIY Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tujuan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	83	Triwulan I	83
					Triwulan II	83
					Triwulan III	83
					Triwulan IV	83*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Tabel II.5. Perjanjian Kinerja Sasaran Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96,00	Triwulan I	29,99
					Triwulan II	68,17
					Triwulan III	90,61
					Triwulan IV	96,00
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp60.568.882.800,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp114.830.190.319,00
Jumlah Anggaran		Rp175.399.073.119,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	83	Triwulan I	83
					Triwulan II	83
					Triwulan III	83
					Triwulan IV	83*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan lV karena bersifat outcome

Tabel II.7. Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Sekretaris DPRD DIY Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	96	Triwulan I	12,95
					Triwulan II	33,99
					Triwulan III	61,51
					Triwulan IV	96,00
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

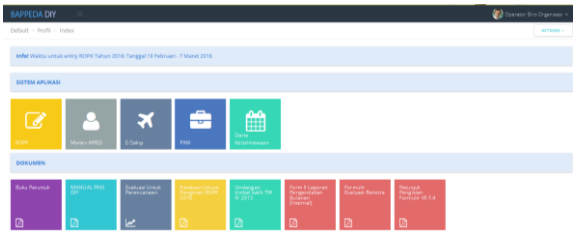
No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp952.407.200,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp65.100.248.60000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp111.798.519.765,00
Jumlah Anggaran		Rp177.851.175.565,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Monitoring



Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. Instrumen yang digunakan sebagai wadah pemberdayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat adalah website JDIH DPRD DIY Melalui JDIH DPRD DIY ini publik dapat melihat dinamika perkembangan Perda/ Perdais, Peraturan DPRD Keputusan DPRD, kajian pengawasan dan artikel hukum lain. Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) judul Peraturan Daerah yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris dengan *judul "Regional Regulations of the Special Region of Yogyakarta Number 2 of 2024 on Anniversary of the Special Region of Yogyakarta"*

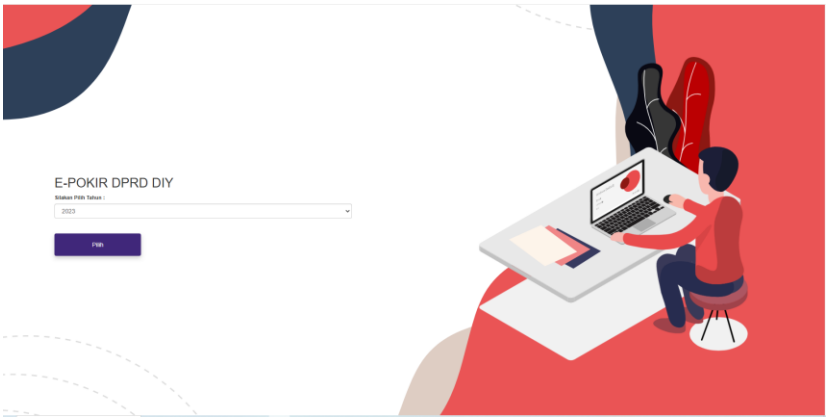
Gambar II.2. JDIH DPRD DIY



Sumber:http: https://jdih.dprd-diy.go.id/

3. Instrumen yang digunakan oleh Sekretariat DPRD DIY untuk memfasilitasi anggota DPRD DIY dalam mengusulkan kegiatan sebaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah Aplikasi E-Pokir DPRD DIY. Di dalam aplikasi ini terdapat menu pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Setelah di input dalam aplikasi oleh Anggota DPRD DIY kemudian diverifikasi oleh Sekretariat DPRD DIY, dilanjutkan verifikasi oleh OPD terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kegiatan tersebut dan terakhir diverifikasi oleh TAPD (Bappeda dan BPKA).

Gambar II.3. Aplikasi E-Pokir DPRD DIY



https://pokir.jogjaprov.go.id/

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :
1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. *Efisiensi Anggaran*
4. *Inovasi*
5. *Lintas Sektor*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Baseline 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD/ Renstra
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria /Kode	
A	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Indikator: Kepuasan pelayanan kepada DPRD Meta Indikator: Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	80	90,36	83	92,81	111,82	Sangat Baik	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Baseline 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024				Target Akhir RPJMD/ Renstra
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria /Kode	
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Indikator: Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Meta Indikator: Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%	%	95,50	137,09	96,	116,66	121,52	Sangat Baik	97
2	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY Meta Indikator: Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	Sangat Baik	A

Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Kinerja Tujuan Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal diukur dengn indicator dan meta indicator sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD

Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id

Kinerja Tujuan Terfasilitasinya kinerja DPRD dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepuasan pelayanan kepada DPRD Meta Indikator : Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD (berdasarkan hasil survei kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD)	90,36	83	92,81 (Hasil survei)	111,82 {(92,81/83,00) x 100%}	86	107,92 {(92,81/86) x 100%}

Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id

Analisis Ketercapaian Tujuan: Kepuasan pelayanan kepada DPRD adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 111,82% (terlampaui)
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 90,36%, terdapat kenaikan sebesar 2,45%
c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 107,92%

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis yakni Terfasilitasinya kinerja DPRD dan Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.

3.1.2. Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD

Kinerja sasaran Terfasilitasinya kinerja DPRD diukur dengan indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Tabel III.5. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100

Sumber data diolah dari jumlah agenda DPRD yang selesai. Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan) serta jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili. Tahun 2024 jumlah agenda DPRD yang selesai sejumlah 70 agenda kemudian dibagi dengan jumlah agenda yang direncanakan sejumlah 60 agenda dikali 100% atau dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

(Bahan acara + jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi) / jumlah agenda yang direncanakan (bahan acara+laporan) x 100%

(70/100) x 100% = 116,66%

Tabel III.6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra 2027 (%)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator: Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu Meta Indikator: Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%	137,09	96	116,66 (70 agenda yang selesai / 60 agenda yang direncanakan x 100)	121,52 (116,66 / 96,00 x 100)	97	120,27

Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Terfasilitasinya kinerja DPRD adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 116,66%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 121,52% (terlampaui).
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 137,09%, terdapat penurunan sebesar 20,43%.
c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 120,27%

Keberhasilan capaian sasaran 1, dengan Indikator Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.7. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
	1.1.Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				
	1.1.1.Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4 laporan	4 laporan	100%
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96%	116,66%	121,52
	2.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 dokumen	15 dokumen	100%
	2.1.2. Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 dokumen	9 dokumen	90%
	2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 dokumen	4 dokumen	100%
	2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	158 dokumen	158 dokumen	100%
	2.1.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran				
	2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	100%
	2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	2.2.3. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.2.4. Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	2.2.5. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.2.6. Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
	2.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6 laporan	6 laporan	100%
	2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 laporan	5 laporan	100%
	2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 laporan	5 laporan	100%
	2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 laporan	5 laporan	100%
	2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD				
	2.4.2. Orientasi	Jumlah Dokumen	1	1	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	DPRD	Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen	dokumen	
	2.4.3. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	6 dokumen	100%
	2.4.4. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	18 dokumen	18 dokumen	100%
	2.4.5. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 orang	18 orang	100%
	2.4.6. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	7 orang	100%
	2.4.7. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	36 dokumen	36 dokumen	100%
	2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
	2.5.1. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%
	2.5.2. Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 dokumen	2 dokumen	100%
	2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
	2.6.1. Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	2.6.2. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 laporan	2 laporan	100%
	2.7. Fasilitasi Tugas DPRD				
	2.7.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 dokumen	48 dokumen	100%
	2.7.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 laporan	2 laporan	100%
	2.7.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 dokumen	15 dokumen	100%
	2.7.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	13 dokumen	13 dokumen	100%

Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id

Capaian tersebut di dukung dari:

a. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
b. Capaian Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

-Indikator Program: Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu

-Ditargetkan 96% terealisasi 116,66% diperoleh dari jumlah agenda DPRD yang selesai. Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan) serta jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili. Tahun 2024 jumlah agenda DPRD yang selesai sejumlah 70 agenda kemudian dibagi dengan jumlah agenda yang direncanakan sejumlah 60 agenda dikali 100% atau dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

(Bahan acara + jumlah laporan/dokumen yang terkait dengan fungsi jaring aspirasi dan sosialisasi) / jumlah agenda yang direncanakan (bahan acara+laporan) x 100% (70/100) x 100% = 116,66%

-Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan 7 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

- Hasil Penilaian kinerja setiap Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.8. Hasil Penilaian Kinerja Setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 1

1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Score**
1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	91,20
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	
2.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	97,60
2.2	Pembahasan Rancangan Perda	88,67
2.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	96,20
2.4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	90,93
2.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	96,20
2.6	Pembahasan KUA dan PPAS	94,80
2.7	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	94,80
2.8	Pembahasan APBD	93,40
2.9	Pembahasan Perubahan APBD	94,80
2.10	Pembahasan Laporan Semester	96,20
2.11	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	93,60
2.12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	93,20
2.13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	94,80

2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	
2.14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	93,20
2.15	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	93,20
2.16	Orientasi DPRD	96,20
2.17	Pendalaman Tugas DPRD	96.20
2.18	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	93.60
2.19	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	94.60
2.20	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	95.00
2.21	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	97.60
2.22	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	91.87
2.23	Pelaksanaan Reses	91.87
2.24	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	94.60
2.25	Pengawasan Kode Etik DPRD	93.60
2.26	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	93.20
2.27	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	93.60
2.28	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	91.93
2.29	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	96.60

Faktor Pendukung keberhasilan:

a. Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas pokok fungsi DPRD DIY;
b. Kepatuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam berpedoman terhadap Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya;
c. Adanya Pelantikan anggota DPRD DIY masa jabatan 2024 – 2029, Pelantikan Pimpinan Definitif, Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dan tambahan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DIY di triwulan III dan IV, sehingga menambah jumlah bahan acara yang terselesaikan.

Faktor Penghambat Keberhasilan:

a. Terdapat Pembahasan Rancangan Perda yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu Pansus Pelabuhan Perikanan;
b. Adanya Pelantikan anggota DPRD DIY masa jabatan 2024 – 2029 dan pembentukan Pimpinan Definitif yang membutuhkan waktu sehingga beberapa kegiatan DPRD tertunda sampai terbentuknya Pimpinan Definitif dan Alat Kelengkapan Dewan DPRD DIY

Gambar III.1.1. Rapat Paripurna Pelantikan Anggora DPRD DIY Masa Jabatan 2024-2029



Gambar III.1.2. Rapat Pansus Pembahasan Tata Tertib DPRD DIY



3.1.2. Sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Nilai Kategori Reformasi Birokrasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10. Target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY Meta Indikator: (Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah)	A (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah)	A (82)	A (88,76) (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2024)	108,24% (88,76/82 x 100%)	A	108,5%

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024, Sekretariat DPRD DIY mendapatkan nilai skor indeks RB Perangkat Daerah 88,76 dengan kategori A (Memuaskan),
b. Target tahun 2024 nilai skor indeks RB adalah sebesar 82,00, realisasi sebesar 88,76 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 108,24%
c. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 99% terdapat kenaikan sebesar 9,24%
d. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 sebesar 108,5%

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.11. Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,5	91,99	103,94
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100%
	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100%
	1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
	1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	80 orang/bulan	100%
	1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
	1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	100%
	1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD				
	1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	14 laporan	14 laporan	100%
	1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dokumen	16 dokumen	100%
	1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	25 orang	100%
	1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
	1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
	1.5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
	1.5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	100%
	1.5.5.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	36 laporan	100%
	1.6. Pengadaan Barang Milik				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 unit	41 unit	100%
	1.6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0.2 unit	28,85%
	1.6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%
	1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	60 laporan	100%
	1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	48 laporan	100%
	1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	Daerah				
	1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	100%
	1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	28 unit	100%
	1.8.3. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	14 unit	100%
	1.8.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274 unit	274 unit	100%
	1.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100%
	1.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
	1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 orang/bulan	55 orang/bulan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	% Capaian
	1.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Penyediaan pakaian dinas dan atribut sesuai PP 18/2017 bagi pimpinan dan anggota DPRD	495 paket	495 paket	100%
	1.9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 orang	45 orang	81,80%
	1.10. Layanan Adminstrasi DPRD				
	1.10.1.Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	371 laporan	371 laporan	100%
	1.10.2. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD	40 laporan	40 laporan	100%

Capaian Sasaran 2 dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung dari Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yaitu:

1. Indikator program : Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Ditargetkan nilai 88,5 terealisasi 91,99 (103,94%)
3. Keberhasilan capaian indikator program ini didukung oleh keberhasilan pelaksanaan 10 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.
4. Hasil Penilaian kinerja setiap Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.12. Hasil Penilaian kinerja setiap Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2

No	Program/Sub Kegiatan	Score
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91,99
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92,87
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	95,20
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,20
1.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92,20
1.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92,20
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	92,20
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	92,20
1.8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	88,60
1.9	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	92,20
1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93,60
1.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92,20
1.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93,60
1.13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92,20
1.14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92,20
1.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93,60
1.16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92,20
1.17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64,60
1.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,20
1.19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92,20
1.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,20

No	Program/Sub Kegiatan	Score
1.21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92,20
1.22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92,20
1.23	Pemeliharaan Mebel	87,20
1.24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92,20
1.25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92,20
1.26	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	93,60
1.27	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	91,27
1.28	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	68,20
1.29	Fasilitasi Fraksi DPRD	94,60
1.30	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	97,60

Sumber: http://sengguh.jogjaprov.go.id, Dokumen PKKI Triwulan IV Tahun 2024

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Komitmen Pejabat Struktural, Fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai arahan pemda;
b. Komitmen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK);
c. Pengadaan Barang melalui e-cataloge sehingga lebih transparan serta proses pengadaannya lebih cepat selesai;

Faktor Penghambat Keberhasilan

a. Pengadaan Gedung DPRD DIY tidak sesuai dengan tahapan yang direncanakan sehingga anggaran untuk pembangunan gedung belum terealisasi karena proses lelang yang belum selesai;
b. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tidak tercapai sesuai target yaitu sebesar 45 orang karena sebanyak 10 orang tidak melaksanakan Medical Check up sesuai dengan hak nya, sehingga hanya tercapai 45 orang;

Gambar III.1.3. Pelayanan Medical Check Up Anggota DPRD DIY



3.2. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda sebagaimana amanat cascading Kinerja Sekretariat DPRD DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.13. Kontribusi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Good Governance	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas Pemerintah (AKIP 3. Indeks	WTP AA	*) WTP AA	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas layanan kinerja dan aktivitas	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	83%	92,81%

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
		demokrasi Indonesia (IDI)			DPRD yang optimal			
					Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY)	96%	116,66%
					Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	A (81,93)	A (88,76)

Penjelasan:

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki ketugasan membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berperan dalam mendukung tata kelola pemerintah daerah dengan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD serta tetap memperhatikan peraturan dan arahan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor 90 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Tabel III.14. Kontribusi Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1.Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tinggi 86,07	Tinggi 86,67	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	96 %	116,66 %	121,52

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,5	91,99	103,94

Sumber : Ekspose Pengendalian Kinerja s.d. Triwulan IV 2024

Penjelasan

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Daerah DIY merupakan akumulasi dari SKM seluruh OPD termasuk Sekretariat DPRD DIY.
2. Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat DPRD DIY, menjadi metode penyajian data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat DPRD DIY. Survei ini, dijadikan tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan sekaligus *feedback* perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat, selain itu merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pelayanan publik.

3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.15. Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	83	92,81	111,82				
1	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	96	116,66	121,52	66.052.655.800	55.538.112.574	84,08	10.514.543.226
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	A (82)	A (88,76)	108,24	111.798.519.765	62.326.103.483	55.75	49.472.416.282
Jumlah						177.851.175.565	117.864.216.057	66,27	59.986.959.508

Sumber: *http://sengguh.jogjaprov.go.id/***,** *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD DIYTh 2024, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD DIY Th 2024*

Berdasarkan tabel III.13 di atas capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD DIY melampaui target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp177.851.175.565,00 dan terealisasi Rp117.864.216.057,00 atau 66.27%, sehingga dapat dikatakan efisien.

Terdapat efisiensi Rp59.986.959.508,00 atau 33,73% yang bersumber dari:

- Anggaran pengadaan Gedung tahun pertama dari tiga tahun yang direncanakan, tidak terserap pada anggaran konstruksi karena belum bisa ditenderkan/dilelang.
- Anggaran makan minum rapat yang tidak terserap karena komunikasi lebih banyak sosial media dan untuk makan minum rapat yang melibatkan anggota DPRD menyesuaikan kebutuhan;
- Anggaran Penggandaan karena sudah banyak menggunakan sistem *paperless*;
- Sisa pengadaan barang dan jasa (lelang/selisih antara nilai Kontrak dengan Pagu yang ada);
- Anggaran gaji anggota DPRD DIY karena adanya pergantian anggota DPRD DIY masa Jabatan 2019-2024 ke Anggota DPRD masa Jabatan 2024-2029 sehingga ada waktu jeda pembayaran tunjangan-tunjangan Anggota DPRD DIY karena penetapan Pimpinan Definitif dan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD membutuhkan waktu yang tidak sebentar;
- Anggaran Medical Check Up (MCU) anggota DPRD karena ada beberapa anggota yang tidak melaksanakan MCU;
- Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri karena ada beberapa anggota dewan yang tidak mengikuti kunjungan dan karena ada yang menggunakan moda kereta api serta sisa dari penginapan 30%;
- Anggaran honor narasumber karena beberapa kegiatan ada yang tidak menggunakan narasumber dan beberapa kegiatan yang menggunakan narasumber ASN Pemda DIY sehingga tidak diberikan honor.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Sistem pengamanan berbasis elektronik setiap tamu yg masuk ke kantor DPRD harus lapor dan mengisi buku tamu dan di lakukan pengambilan gambar data tersebut melalui hilook cctv dan di simpan dalam google drive buku tamu DPRD DIY
b. Optimalisasi pengelolaan kearsipan ini untuk pengelolaan arsip vital, terutama arsip bahan acara di simpan ke dalam google drive untuk mempermudah jika sewaktu-waktu diperlukan
c. Penggunaan inovasi *Pak Lalu Uber Dana* yang merupakan sebuah upaya percepatan layanan penatausahaan keuangan dengan membangun kolaborasi antara tim penatausahaan keuangan dengan PPTK dalam pemanfaatan google *spreadsheet* dan *Linktree*. Uber Dana menyediakan menu-menu percepatan layanan dalam bentuk *google spreadsheet* dan tehubung melalui *linktree* sehingga pengumpulan BKU dari PPTK menjaadi lebih cepat, efektif dan efisien. Melalui *Google Spreadsheet* terbentuk komunikasi dua arah antara Subbagian Keuangan dengan pemangku kegiatan. Linktree menyediakan menu-menu yang dapat diakses oleh PPTK, antara lain template BKU, juknis dan alur SPJ, Monitoring Proses SPJ dan spreadsheet masing-masing Bagian.

3.5 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasii guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Sekretariat DPRD DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan skema kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang

Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.16.

Inventarisasi Lintas Sektor Sekretariat DPRD DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Penyusunan Kebijakan Anggaran	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran DPRD DIY bersama TAPD, Rapat-Rapat Komisi bersama mitra kerjanya masing-masing	Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, KUPA PPASP, Raperda APBD dan Raperda APBD P, serta Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD)	OPD di Lingkungan Pemda DIY dan Masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Bagi Kelompok Sasaran: 1. Bagi Pemda DIY: menjadi kepastian hukum pelaksanaan program dan belanja daerah

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
						2. Kelompok sasaran Masyarakat: sebagai stimulus perekonomian di masyarakat dengan program kegiatan berupa bantuan hibah/bansos maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY.
		Perguruan Tinggi	Memberikan masukan sebagai narasumber pada kegiatan Publik Hearing dan rapat-rapat kerja di DPRD			
		Masyarakat	Memberikan masukan pada saat publik hearing penyusunan APBD			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan evaluasi RAPBD Murni, Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah			
2.	Pembentukan Perda dan peraturan DPRD	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi Rapat-Rapat penyusunan Naskah Akademik, Rapat-Rapat Bapemperda, Rapat pansus-Pansus	Pembentukan Perda dan peraturan DPRD	OPD di Lingkungan Pemda DIY	Memfasilitasi Rapat-Rapat penyusunan Naskah Akademik, Rapat-Rapat Bapemperda, Rapat pansus-Pansus
		Kanwil Kemenkumham	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, harmonisasi rperda inisiatif dan Narasumber pada pembahasan Raperda oleh Pansus		Kanwil Kemenkumham	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, harmonisasi rperda inisiatif dan Narasumber pada pembahasan Raperda oleh Pansus

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi Opd Dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Perguruan tinggi	Narasumber pada tim penyusun NA Raperda Inisiatif DPRD		Perguruan tinggi	Narasumber pada tim penyusun NA Raperda Inisiatif DPRD
		OPD Teknis	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, dan menjadi mitra dalam pembahasan Bersama pansus		OPD Teknis	Terlibat dalam penyusunan Rancangan NA, Raperda, dan menjadi mitra dalam pembahasan Bersama pansus
		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan Evaluasi terhadap Raperda-raperda Anggaran, Pajak dan RT-RW. 2. Fasilitasi Raperda-Raperda di luar Anggaran Pajak, Retribusi dan RTRW		Kementerian Dalam Negeri	Melakukan Evaluasi terhadap Raperda-raperda Anggaran, Pajak dan RT-RW. 2. Fasilitasi Raperda-Raperda di luar Anggaran Pajak, Retribusi dan RTRW

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :
1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD DIY tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD DIY memiliki tujuan Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal, terealisasi 92,81% dari target 83,00% dengan prosentase realisasi sebesar 111,82%. Dibandingkan capaian indikator tujuan tahun 2023 sebesar 90,36% terjadi kenaikan sebesar 21,46%;
2. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD DIY memiliki 2 (dua) indikator sasaran dan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni :
   a. Sasaran Terfasilitasinya Kinerja DPRD, terealisasi 116,66% dari target 96% dengan prosentase realisasi sebesar 121,52%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 137,09% terjadi penurunan sebesar 20,43%;
   b. Sasaran Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY, terealisasi 88,76 dengan kategori A dari target 82,00 dengan kategori A, dengan prosentase realisasi sebesar 108,24%. Dibandingkan capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 99% terjadi kenaikan sebesar 9,24%.

3. Hambatan dan permasalahan

   a. Adanya Surat Edaran bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri:

      Nomor: SE-1/Pk/2024

      Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda

      Pemerintah Daerah DIY mulai per 8 Oktober 2024 pelaksanaan anggaran belanja dalam APBD TA 2024, mengacu pada batasan tertinggi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya surat edaran bersama tersebut sehingga untuk anggaran perjalanan dinas terdapat sisa anggaran dalam pelaksanaanya karena dalam penganggaran berpedoman pada Standar Satuan Harga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

   b. Kegiatan pelaksanaan *Medical Check Up* bagi anggota DPRD DIY ada 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD DIY tidak menggunakan fasilitasi *Medical Check Up*.

4. Faktor-Faktor Keberhasilan tercapainya kinerja Sekretariat DPRD DIY antara lain:

   a. Komitmen Pimpinan DPRD dalam mengoordinasikan Alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menyelesaikan tugas pokok fungsi DPRD DIY ;

b. Kepatuhan Alat Kelengkapan DPRD dalam berpedoman terhadap Jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah setiap bulannya;
c. Kesiapan sarana, Prasarana dan personil Sekretariat DPRD yang profesional serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan media sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Pimpinan dan Anggota DPRD.
d. meningkatnya aktifitas kegiatan DPRD bertemu masyarakat baik dalam sosialisasi peraturan perundangan maupun penyerapan aspirasi masyarakat.

4.2 Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD lebih meningkat.
b. Penjadwalan/perencanaan kegiatan menyesuaikan tata kala yang diatur dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi raperda APBD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
c. Pelaksanaan Medical Check Up menyesuaikan hasil pendataan/check list yang dilakukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk dilakukan perubahan target kinerja dalam perubahan APBD

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No	Tujuan	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator/ Meta Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target				
							2023	2024	2025	2026	2027
1	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	1)Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	95,50	96,00	96,00	96,50	97,00
			2)Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Indeks	A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274)512688, 512820,560293, 565622 Faksimile (0274) 580692 e-mail: setwan@dprd-diy.go.id website:dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. IMAM PRATANADI, M.T.
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	SEKRETARIS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X	Drs. IMAM PRATANADI, M.T.
	NIP.196710311997031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	83	Triwulan I	83
					Triwulan II	83
					Triwulan III	83
					Triwulan IV	83*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran.....

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	95,50	Triwulan I	12,95
					Triwulan II	33,99
					Triwulan III	61,51
					Triwulan IV	95,50
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Kategori	A (82,00)	Triwulan I	A (82,00)
					Triwulan II	A (82,00)
					Triwulan III	A (82,00)
					Triwulan IV	A (82,00)*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp952.407.200,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (APBD)	Rp65.100.248.600,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp111.798.519.765,00
	Jumlah Anggaran	Rp177.851.175.565,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs. IMAM PRATANADI, M.T.
NIP.196710311997031001

Lampiran 3. Evaluasi AKIP Tahun 2023

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp. (0274) 562009 Fax. (0274) 512567
Website http://inspektorat.jogjaprov.go.id e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 21-3-2024

Nomor : 700 / 510
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023

Kepada
Yth. Sekretaris DPRD DIY
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. **Dasar Hukum Evaluasi**
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   c. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
   d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;
   e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KEP/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;

f. Surat

f. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 052/II/INSP/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran

6. **Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Sekretariat DPRD DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

Sesuai Peraturan Gubernur DIY tersebut, bahwa Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas "Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat DPRD DIY mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Sekretariat DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
c. penyelenggaraan administrasi keuangan;
d. penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD;
f. fasilitasi pelaksanaan pembentukan produk hukum, dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum, serta pengkajian dan pengawasan;
g. fasilitasi alat kelengkapan DPRD;
h. fasilitasi penetapan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur;
i. penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu anggota DPRD;
j. fasilitasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD;
k. pelaksanaan hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, keprotokolan dan pelayanan aspirasi masyarakat;
l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD;
m. fasilitasi penyusunan kebijakan prosea bisnis Sekretariat DPRD;
n. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD;

o. pemantauan,

o. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD DIY memiliki susunan struktur organisasi terdiri dari:

a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum, terdiri atas:
   1) Subbagian Tata Usaha; dan
   2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
c. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri atas Subbagian Keuangan;
d. Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian;
e. Bagian Persidangan;
f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Sekretariat DPRD DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada aspek perencanaan kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
c. Pada aspek pelaporan kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Sekretariat DPRD DIY telah menggunakan aplikasi *Sengguh* dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan aplikasi *ASN Memayu* sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas fungsi adalah penggunaan aplikasi e-Pokir.

8. Tindak...

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Sekretariat DPRD DIY telah menindaklanjuti dengan:

a meningkatkan penerapan manajemen kinerja berkelanjutan, meliputi perencanaan kinerja pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal;

b meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pencapaian indikator sasaran Sekretariat DPRD DIY;

c menggali inovasi, gagasan, dan ide kreatif dalam rangka pencapaian kinerja.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Sekretariat DPRD DIY memperoleh nilai sebesar 87,19. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,57 atau 88,58% dari bobot sebesar 30%;

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,14 atau 87,14% dari bobot sebesar 30%;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,02 atau 86,81 % dari bobot sebesar 15%;

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,45 atau 85,80% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Sekretaris DPRD DIY agar:

a. Meningkatkan Kualitas LKjIP;

b. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik *output*, outcome maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya, diantaranya pada subkegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD DIY memperoleh nilai 87,19 (delapan puluh tujuh koma sembilan belas). Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh unsur pada Sekretariat DPRD DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP. 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur DIY

Lampiran 4. Tanggapan atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274) 512668, 512820, 560293, 565622 Faksimile (0274) 580692
website: dprd-diy.go.id e-mail: setwan@dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

Yogyakarta, 15 Mei 2024

Nomor : 700/1717
Si fat : Segera
Lampiran :
Hal : Tanggapan atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023

Kepada
Yth. Inspektur DIY
di-
YOGYAKARTA.

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Inspektur DIY Nomor 700/510 tanggal 21 Maret 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat DPRD DIY Tahun 2023, Sekretariat DPRD DIY bersedia melaksanakan rekomendasi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas LKjIP.
2. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target baik output, outcome maupun IKU yang ditetapkan dapat tercapai dan lebih baik.
3. Pada subkegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD, Sekretariat DPRD DIY akan lebih intensif melakukan kegiatan sosialisasi pentingnya cek kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DIY.

Demikian mohon dapat menjadi periksa dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

SETWAN

Drs. Imam Pratanadi, M.T.
NIP 19671031 1997031001

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA